



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 13(2), 237-250



RESEARCH ARTICLE

GERAKAN JEONGSHINDAE 1990-2015: PERJUANGAN TUNTUTAN HAK KORBAN SISTEM PERBUDAKAN SEKSUAL JŪGUN'IANFU DI KOREA SELATAN

Ernasari, Leli Yulifar, Agus Mulyana

Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
ernasari@upi.edu

To cite this article: Ernasari., Yulifar, L., & Mulyana, A. (2024). Gerakan jeongshindae 1990-2015: perjuangan tuntutan hak korban sistem perbudakan seksual jŭgun'ianfu di korea selatan. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 13(2), 237-250. <https://doi.org/10.17509/factum.v13i2.50736>.

Abstract

Jeongshindae movement carried out by victims of the military section system during the Korean occupation (1910-1945), along with women activists in South Korea whose agenda was to seek justice. The method used is historical research consisting of heuristics, criticism, and historiography. The occurrence of dynamics in the response of the Japanese government rejects legal accountability. The movement forms a strong transnational advocacy network and involves an inter-government organization to increase pressure on Japan. The resolution from the US DPR and the agreement between South Korea and Japan was achieved. But in the end, the resolution was ignored by the Japanese government, and the agreement was carried out unilaterally so that the legal responsibility and the demands of survivors were not fulfilled. Thus the issue of Jeongshindae cannot be completed at this stage.

Abstrak

Gerakan jeongshindae dilakukan oleh korban sistem perbudakan seksual militer pada masa pendudukan Jepang di Korea (1910-1945), bersama dengan aktivis perempuan di Korea Selatan yang melancarkan agendanya untuk mencari keadilan. Metode yang digunakan ialah penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, dan historiografi. Terjadi dinamika dalam respon pemerintah Jepang yang menolak pertanggungjawaban hukum. Pergerakan membentuk suatu jaringan advokasi transnasional yang kuat dan melibatkan organisasi antarpemerintah untuk menambah tekanan bagi Jepang. Resolusi dari DPR AS dan perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang tercapai. Namun pada akhirnya, resolusi diabaikan pemerintah Jepang dan perjanjian dilakukan sepihak sehingga pertanggungjawaban hukum dan pemenuhan tuntutan penyintas tidak terpenuhi. Dengan demikian isu jeongshindae tidak dapat diselesaikan pada tahap ini.

© 2024 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

Article Info

Article History:
Submitted/Received 20 Sept. 2022
First Revised 30 January 2024
Accepted 01 Sept 2024
First Available online 30 Oct 2024
Publication 30 Oct 2024

Keyword:

Jeongshindae,
Korea Selatan,
Jepang,
Jŭgun'ianfu

PENDAHULUAN

Penelitian terkait isu *jeongshindae* dengan fokus peran perempuan sebagai subjek masih terbatas. Dalam hal ini, aktor pergerakannya terdiri dari penyintas atau korban sistem perbudakan seksual *jūgun'ianfu* dan Organisasi Non-Pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) perempuan di Korea Selatan. Permasalahan tersebut menjadi kegelisahan penulis untuk mengangkat mengenai gerakan *jeongshindae* yang agenda utamanya ialah memperjuangkan tuntutan hak penyintas. Istilah *jeongshindae* sendiri bermakna sama dengan *jūgun'ianfu* namun lebih ditujukan kepada penyintas dari Korea.

Berkenaan dengan penelitian mengenai isu *jeongshindae* yang berfokus pada gerakannya pernah dikaji oleh salah satu mahasiswa dari University of Tennessee. Ia memfokuskan lebih spesifik pada strategi gerakan perempuan dengan menggunakan kampanye peringatan untuk mengembalikan martabat kemanusiaan penyintas yang telah mendapatkan stigma dan trauma akibat sistem 'wanita penghibur' militer Jepang (Yoon, 2017, hlm. iv). Sementara itu, tuntutan penyintas tidak hanya peringatan melalui kampanye dan pembangunan tugu atau monumen, namun juga perlu dipenuhi dalam hal pengakuan Jepang atas mobilisasi paksa, permintaan maaf secara resmi pada penyintas, investigasi sistem *jūgun'ianfu*, reparasi bagi penyintas dan keluarga, serta muatan isu *jeongshindae* sebagai perbudakan seksual dalam pendidikan (Min, 2021, hlm. 138).

Meninjau alasan Jepang mendirikan sistem *jūgun'ianfu* dapat dianalisis dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo (1941-1944) yakni, "Dari perspektif Asia, wanita adalah barang strategis, dan mereka adalah materi kemenangan yang tak tergantikan" (Mingzhe, 2017, hlm. 18). Dengan demikian, jiwa zaman perangkat militer dan pemerintahan Jepang kala itu meyakini bahwa eksploitasi wanita dapat menghantarkan mereka pada kemenangan perang. *Jūgun'ianfu* dapat menghilangkan efek stres yang dirasakan

tentara Jepang dengan memenuhi kepuasan seksualnya. Namun apakah perempuan yang mereka eksploitasi itu mau dan rela melakukannya?

Pada kenyataannya, melihat dari cara perekrutannya terdapat paksaan. Bahkan menurut Yamashita (dalam Kristi, 2016, hlm. 324), *jūgun'ianfu* merupakan kejahatan transnasional seksual yang sangat besar karena melibatkan perempuan dari berbagai negara pendudukan Jepang. Selain itu praktiknya menyerupai perbudakan khususnya terhadap perempuan secara seksual. Hal ini melanggar hukum internasional yang melarang perbudakan yaitu termaktub dalam Konvensi Perbudakan 1926 (League of Nations, 1926). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan dalam sistem ini sehingga perlu adanya gerakan *jeongshindae* untuk memperjuangkan hak penyintasnya.

Dibandingkan dengan korban *jūgun'ianfu* di negara-negara pendudukan Jepang lainnya, pemilihan negara Korea Selatan penulis pertimbangkan berdasarkan pada kekhasan karakteristik pergerakannya yang masif dan hubungan-hubungan kompleks lainnya. Misalnya di Indonesia, menurut Hartono dan Juliantoro (1997, hlm. 181) bahwa dukungan yang luas di Indonesia hingga tahun 1996 tidak pernah muncul. Sementara di Korea Selatan, dukungan datang dari berbagai arah, utamanya dari organisasi antarpemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan orang Korea berdomisili di Amerika dan Jepang yang mendirikan organisasi perempuan dengan rasa nasionalisme yang tinggi.

Hubungan kompleks lainnya adalah sentimen negatif antara Korea Selatan dan Jepang yang timbul dari nasionalisme pada masing-masing negara, namun disisi lain keduanya memiliki kepentingan bersama sehingga mempengaruhi pasang surut pergerakan *jeongshindae*. Sentimen tersebut menurut (Sakaki, 2019, hlm. 2) bagi masyarakat Korea Selatan modern, Jepang adalah titik

acuan negatif utamanya dan sikap anti-Jepang membentuk komponen integral nasionalisme Korea Selatan. Kemudian bagi kaum nasionalis sayap kanan Jepang secara khusus merasa bahwa bangsa yang mereka banggakan menerima kritik berlebihan atas masa lalunya, terutama dari Korea. Permasalahan perbedaan pandangan historis ini menjadi hambatan bagi Amerika Serikat di kedua negara ini yang hendak menanamkan kepentingannya dalam menjaga ancaman dari China dan Korea Utara dalam aspek keamanan dan ekonomi. Dalam mewujudkan hal tersebut, Amerika Serikat menginginkan hubungan normalisasi antara kedua negara ini.

Dengan demikian, pengaruh Amerika Serikat menambah kompleks isu *jeongshindae* sehingga membuat karakteristik yang berbeda dengan kasus korban sistem jŭgun'ianfu di negara lainnya. Meninjau berbagai permasalahan tersebut, tujuan penelitian gerakan *jeongshindae* adalah untuk mengkaji bagaimana proses pergerakannya dan apakah tuntutanya dapat berhasil terpenuhi.

Proses gerakan *jeongshindae* dimulai dari hubungan antar dua negara (Jepang dan Korea Selatan) hingga menjadi isu hak asasi manusia internasional yang melibatkan lembaga-lembaga dunia dapat dipahami melalui gerakan transnasional. Gerakan transnasional muncul karena sejak 1960an terjadi perubahan sosial, budaya dan geopolitik yang telah mentransformasi ruang lingkup gerakan sosial secara institusional dan budaya (Della Porta dan Tarrow, 2005, hlm. 1-2). Gerakan transnasional merupakan tindakan kolektif transnasional, yaitu kampanye internasional terkoordinasi dari jaringan aktivis non-pemerintahan (*Non-Governmental Organization/NGO*) atau yang dalam hal ini kelompok 'penentang' melawan aktor internasional, negara lain, atau lembaga internasional.

Efektifitas pergerakan NGO berkaitan dengan teori Jaringan Advokasi Transnasional (*Transnational Advocacy Network*) yang diperkenalkan oleh Keck dan Sikkink. Jaringan Advokasi Transnasional merupakan

bentuk organisasi antar individu yang berkomitmen, berpengetahuan lintas batas dan mempromosikan penyebab, ide-ide berprinsip, serta norma-norma. Selain itu mereka seringkali melibatkan individu yang mengadvokasi perubahan kebijakan. Teori ini muncul ketika saluran antara kelompok atau NGO domestik (di dalam negeri) dan pemerintah mereka tidak efektif sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini biasanya permasalahannya seputar klaim jaringan advokasi atas hak-hak mereka. Oleh karenanya, berbagai NGO mencari sistem dan sekutu yang lebih kuat dengan mencari dukungan dan perhatian melalui koneksi internasional agar dapat melindungi hidup mereka. (Keck dan Sikkink, 1998, hlm. 12).

Keck dan Sikkink (1998, hlm. 20-21) lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat pola bumerang yang dapat menggambarkan pergerakan jaringan advokasi dan hubungannya dengan pemerintahan di negaranya, negara target, dan lembaga internasional. Pola bumerang ini terjadi ketika saluran antara negara target dan aktor pergerakannya dihalang. NGO domestik dapat melewati negara mereka sendiri dan langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba menekan negara target dari luar. Hal ini paling jelas terjadi dalam kampanye hak asasi manusia, hak-hak adat dan kampanye lingkungan. Pada pola bumerang, negara target (Negara A) ketika memblokir ganti rugi atau pertanggungjawaban dari NGO yang menuntutnya dapat mengaktifkan jaringan dimana NGO menekan negara mereka sendiri (Negara B) dan organisasi pihak ketiga atau lembaga internasional yang kembali menekan Negara A. Oleh karena itu, hal ini dapat menciptakan ketegangan yang luar biasa.

Jika diaplikasikan dalam gerakan *jeongshindae*, pemerintah Jepang berperan sebagai negara target (Negara A) dan negara domestik (Negara B) ialah pemerintah Korea Selatan beserta *Korean Council* sebagai NGO yang berasal dari negara asalnya. Dalam pergerakannya, *Korean Council*

berbagi informasi melalui konferensi dan pertemuan lainnya untuk melancarkan agenda penyelesaian isu *jeongshindae* dengan cara menuntut pertanggungjawaban kepada Jepang. Hal ini menjadi tekanan bagi Jepang ketika pemerintahannya menolak tuntutan tersebut, dan akan semakin membesar ketika NGO membawa isu ini ke organisasi antarpemerintah yang dalam hal ini terdiri dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Komisi Juri Internasional, dan organisasi-organisasi lainnya.

Pengaruh jaringan advokasi perlu meninjau capaian tujuan pada beberapa tingkatan yang berbeda. Keck dan Sikkink (1998, hlm. 25) mengidentifikasi pengaruh jaringan advokasi terhadap tahapan yang terdiri dari: (1) pembuatan isu dan penetapan agenda; (2) posisi diskursif negara dan organisasi internasional; (3) prosedur kelembagaan; (4) perubahan kebijakan dalam “pelaku sasaran” yang dapat berupa negara, organisasi internasional, atau aktor swasta; dan (5) perilaku negara. Pengaruh jaringan advokasi terhadap situasi yang dipaparkan oleh Keck dan Sikkink tersebut dapat menganalisis sejauh mana pergerakan *jeongshindae* dalam mencapai tujuannya tersendiri.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti merupakan metode sejarah dengan teknik pengumpulan data studi literatur. menurut Garraghan (1957, hlm. 33), metode sejarah merupakan seperangkat prinsip dan aturan sistematis untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis yang umumnya berbentuk tulisan dari hasil yang dicapai. tahapan dalam metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dengan mengacu langkah menurut Garraghan (1957, hlm. 33) adalah sebagai berikut.

Tahapan pertama, ialah heuristik dimana penulis menggunakan teknik studi literatur

sehingga dalam pencariannya akan sangat berkaitan dengan sumber-sumber buku, artikel dari jurnal, surat kabar, rekaman dan dokumen lainnya. Penulis mengunjungi Perpustakaan Universitas Pendidikan, ruang KICC (*Korea-Indonesia Cultural Corner*), Perpustakaan Batu Api, dan mengakses situs-situs resmi, platform gratis maupun berbayar, e-journal, e-book dan sumber lainnya di internet.

Kedua yaitu kritik sumber yakni penulis melakukan kritik internal dengan mengklasifikasikan sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang ditemukan dan digunakan oleh peneliti yakni berupa dokumen resmi instansi seperti catatan laporan dari PBB, rekaman video kesaksian dari penyintas, surat kabar, serta pernyataan resmi pemerintah yang diunggah pada situs resmi. Peneliti melakukan kritik bahwasannya sumber-sumber tersebut masuk kepada kategori primer karena sezaman dengan peristiwa yang dikaji, asli, dan dipublikasikan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Sementara sumber sekunder terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh sejarawan, seperti Yoshimi Yoshiaki, Hata Ikuhiko, Wada Haruki, adapula dari kalangan sosiolog seperti Pyong Gap-Min, antropolog yaitu George Hicks dan Chunghee Sarah Soh, kemudian yang lainnya merupakan hasil penelitian berupa artikel dan karya ilmiah lainnya.

Ketiga, penulis melakukan historiografi yang didalamnya terdapat proses interpretasi terhadap sumber dan disajikan ke dalam artikel ilmiah. Pada prosesnya penulis akan mengkontruksi fakta dan peristiwa yang disusun dengan uraian secara kronologis. Selain itu, akan berupaya untuk mengoptimalkan keterampilan dalam menulis sejarah dari mulai mengimplementasikan teori yang relevan, mengolah sumber yang tidak hanya dikutip namun juga dianalisis secara kritis. Kemudian diberikan suatu interpretasi sehingga karya ilmiah ini terkandung makna dan pembelajaran yang hendak disampaikan peneliti.

PEMBAHASAN

Pembuatan Isu Jeongshindae sebagai Perbudakan Seksual

Pada awalnya isu *jeongshindae* tidak mendapatkan perhatian dari publik namun berkat peran organisasi-organisasi non-pemerintahan di dalam maupun luar negeri terutama dinisiasi oleh tokoh-tokoh perempuan terdidik, isu ini berhasil menjadi masalah hak asasi manusia. Hal ini dilakukan oleh Yun Chung-Ok, yang antara tahun 1957-1991 menjadi profesor yang mengajar Sastra Inggris di Universitas Wanita Ewha. Ia lahir pada tahun 1925 tepatnya ketika masa pendudukan Jepang. Ketika ia masih menjadi siswi berusia 17 tahun di Ewha Hakdang, mobilisasi paksa 'wanita penghibur' tengah gencar dilaksanakan, bahkan mereka mengincar siswi Ewha Hakdang yang pada tahun 1943 masih berstatus sebagai sekolah tinggi.

Yun Chung-Ok memerlukan suatu lembaga sebagai kekuatan, penunjang dana dan pengaruh yang lebih besar dalam mencari penyintas. Ia mencari dukungan pada awal 1980-an kepada Lee Hyo-Jae, seorang profesor sosiologi di Universitas Perempuan Ewha yang juga merupakan salah satu teman dekatnya (dalam Min, 2021, hlm. 134). Ia merupakan aktivis perempuan yang banyak berperan dan merupakan pemimpin perempuan terkemuka di Korea Selatan khususnya pada masa rezim militer. Jika melihat fokus utama aktivis dan organisasi perempuan pada masa rezim militer, penyelesaian isu *jeongshindae* belum menjadi prioritas karena pada era Park Chung-Hee tengah terjadi eksploitasi terhadap buruh perempuan (*yeogong*).

Sebelumnya, Pada 23 Agustus 1984, KCWU telah mengajukan isu *jeongshindae* sebagai kekerasan seksual dan eksploitasi perempuan pada masa pendudukan Jepang. Isu ini diajukan dalam surat untuk kunjungan Chun Doo-hwan ke Jepang dan mempertanyakan penyelesaiannya (Korean Church Women United, 1984). Namun, dalam pertemuan Presiden Chun Doo-hwan dengan Kaisar Hirohito dan Perdana Menteri Nakasone tidak

menyinggung secara spesifik kepada masalah *jeongshindae*. Kaisar Hirohito menyampaikan permintaan maaf namun ditunjukkan atas kesalahan Jepang ketika menjajah Korea (Seongsinyeodae Shinhakhyeobryeokdan, 2006).

Sebagai respon atas penolakan, pada tahun 1987 didirikan KWAU (Korean Women's Association United) yang terdiri dari berbagai organisasi termasuk KCWU yang bergerak bersama mencapai keadilan bagi penyintas (War and Women's Human Rights Museum, 2022). KWAU mengirim tim pencari fakta beranggotakan tiga orang, dipimpin oleh Yun Chung-Ok, ke Jepang. Mereka berangkat dari Tokushima ke Sapporo, Fukuoka, Hokkaido, dan Okinawa untuk menyusuri jejak *jeongshindae* (Min, 2021, hlm. 135-136).

Hingga pada bulan April 1988 KWAU mensponsori Konferensi Internasional tentang Wanita dan Pariwisata yang diadakan di Seoul dan Pulau Jeju, Korea Selatan. Pada kesempatan ini Yun Chung-Ok mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul "Korean Comfort Women during World War II" (Soh, 1996, hlm. 1232). Ketika Juli 1988, KWAU membentuk sebuah Komite Penelitian untuk Isu *Jeongshindae* (*Jeongshindae Munje Yeongu Wiwonhwi*) untuk mengumpulkan dan menyebarkan bukti-bukti atau memori tentang *jeongshindae* (War and Women's Human Rights Museum, 2022).

Kondisi perpolitikan di Korea Selatan dan Jepang mengalami pergantian pemimpin. Naiknya Roh Tae Woo sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 1988 dan Akihito sebagai Kaisar Jepang pada tahun 1989 memberi harapan baru kepada aktor pergerakan untuk mengangkat kembali isu ini. Meskipun terdapat permintaan maaf, pada kenyataannya Jepang memberikan respon penolakan atas tuntutan-tuntutan pemenuhan hak penyintas *jeongshindae*.

Pemerintahan Jepang tidak sepenuhnya mengakui paksaan mobilisasi perempuan Korea dan keberadaan rumah bordil. Hal ini ditunjukkan oleh Shimizu Tsutao. Ia

mengatakan pada sesi Komite Anggaran tentang ‘wanita penghibur’, “Meskipun tampaknya ada situasi bisnis sektor swasta yang bekerja sama dengan militer untuk memindahkan mereka, kami tidak dapat menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi.” (Asahi Shimbun Digital, 2014).

Menghadapi hal ini, pada bulan Juli 1990, tim riset *jeongshindae* secara independen mendirikan Korean Research Institute for the *Jeongshindae* (KRI), dengan Yun Chung-Ok sebagai pemimpinya. Kebanyakan anggotanya merupakan mahasiswa dari Ewha. Salah satunya ialah Yamashita Yeong-ae, perempuan berdarah Jepang-Korea. Ia berperan dalam menemukan salinan notulen rapat Komite Anggaran Jepang dan memberikannya kepada Yun Chung-Ok. Informasi ini kemudian dibagikan kepada para pemimpin organisasi perempuan (Lee, 1992, hlm. 390; Min, 2021, hlm. 137). Sebagai akibatnya, pada 17 Oktober 1990 KRI mengadakan konferensi pers beserta dengan 37 organisasi perempuan termasuk KCWU dan KWAU (War and Women’s Human Rights Museum, 2022). Dengan adanya bukti baru, Yun dan Lee mengirim surat terbuka pada Perdana Menteri Jepang Kaifu Toshiki dengan mengunjungi kedutaan Jepang di Seoul yang berisi tuntutan serupa dengan sebelumnya (Min, 2022, hlm. 138).

Setelah keluarnya tuntutan tersebut, hingga pertengahan November 1990 pemerintah Jepang belum menanggapi surat tersebut. Ditengah kondisi tersebut pada tanggal 16 November 1990, 37 organisasi perempuan bersatu membentuk Hanguk *Jeongshindae* Munje Daechaek Hyeobuihwi yang sekarang menjadi *Jeongdaehyeob* atau *Korean Council for Women Drafted for Military Sexual Slavery* yang disingkat *Korean Council* (War and Women’s Human Rights Museum, 2022). Pada tahun ini, Korean Council mengirimkan peringatan kepada Perdana Menteri Toshiki Kaifu sebanyak dua kali dan mendesaknya untuk menanggapi dan menyelesaikan isu ‘wanita penghibur’.

Dinamika masih terus berlanjut hingga akhirnya terjadi peristiwa fenomenal yang menjadi representasi dalam memecahkan kebungkaman *jeongshindae* yaitu kesaksian penyintas bernama Kim Hak-Sun. KCWU mengadakan konferensi pers untuk Kim Hak-sun pada 14 Agustus 1991. Konferensi pers tersebut diadakan di kantor KCWU di Seoul. Kim halmeeoni (nenek) bersaksi mengenai pengalamannya sebagai *jeongshindae* selama Perang Dunia II (Min, 2021, hlm. 142).

Dari peristiwa ini, penyintas *jeongshindae* lainnya mulai bermunculan. Pada 18 September 1991 Korean Council membuka ‘*Jeongshindae* Shingu Jeonhwa’ atau ‘Panggilan Pusat *Jeongshindae*’, untuk memudahkan menghimpun penyintas, mendorong agar lebih banyak penyintas untuk berani mengungkapkan kisahnya dan mendukung tuntutan hukum terhadap pemerintah Jepang (Kim, 2014). Menurut Min (2022, hlm. 147) secara keseluruhan, 239 penyintas *jeongshindae* yang selamat telah melapor ke Korean Council atau pemerintah Korea Selatan kesaksian Kim Hak-sun.

Korean Council maju ke tahap hukum internasional dengan mengirimkan delegasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat. Hal ini sesuai dengan tahapan kedua pengaruh jaringan advokasi transnasional Keck dan Sikkink (1998, hlm. 33) yaitu dapat mempengaruhi posisi diskursif ketika membujuk organisasi internasional agar mendukung deklarasi internasional atau mengubah posisi kebijakan domestik.

Dalam pelaksanaannya melobi organisasi internasional, Shin Hei-soo, aktivis feminis internasional yang bergabung dengan Korean Council setelah dia kembali dari Universitas Rutgers di New Jersey, menginisiasi agar permasalahan ini dibawa ke PBB. Menurut Women’s Human Rights Institute of Korea (2022), Shin Hei-soo bergerak bersama dengan pemimpin Korean Council yaitu Lee Hyo-chaeh dan salah satu penyintas yaitu Hwang Geum-ju.

Lee Hyo-jae menyerahkan petisi kepada Komisi HAM PBB (UNCHR) pada 4 Maret 1992 yang berisi permintaan agar menginvestigasi kejahatan Jepang terhadap perempuan Korea selama masa perang dan mendesak supaya membayar kompensasi (Rodriguez, 1997, hlm. 393). Pergerakan menjadi transnasional ketika dilakukan oleh organisasi di luar negeri. Hal ini ditunjukkan oleh Korean-American Women United yang pada tanggal 1 April 1992 meluncurkan gerakan petisi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan *jeongshindae* yaitu dalam membangun sebuah monumen (Chai, 1993, hlm. 82).

Sebagai bentuk tindak lanjut dari berbagai usaha pengajuan *jeongshindae* menjadi isu pelanggaran HAM ke lembaga internasional, pada 14 Mei 1992 dari Jenewa, Swiss PBB memutuskan untuk melakukan penyelidikan dan pencarian fakta atas masalah “wanita penghibur” (Lee, 1992). Hasilnya, Kelompok Kerja Komisi untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer menempatkan masalah ini dalam agenda resmi pertemuannya pada tanggal 15 Agustus 1992 (Chai, 1993, hlm. 82). Agenda ini berlangsung dalam bentuk konferensi Pers yang menampilkan kesaksian Hwang Geum-ju diadakan di Jenewa. Konferensi ini berlangsung dengan sangat sukses. Lee Hyo-jae berbicara tentang reparasi pada pertemuan resmi sebelum dia kembali berangkat ke Korea, dan Shin meminta Sub-Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan penyelidikan tentang masalah *jeongshindae* (Women’s Human Rights Institute of Korea, 2022).

Dalam penetapan agenda pengajuannya ke ranah hukum internasional juga didukung oleh seorang pengacara Jepang, Etsuro Totsuka. Ia membawa isu *jeongshindae* dengan istilah ‘perbudakan seksual’ bukan ‘wanita penghibur’. Totsuka telah menyampaikan terkait kebenaran perbudakan seksual perempuan Korea kepada PBB sejak 1992, dan mendesak pemerintah Jepang untuk mengambil pertanggungjawaban resmi serta kompensasi untuk penyintas (Choi, 2002).

Selain dari mencari dukungan internasional Korean Council dan organisasi perempuan di Jepang memperkuat jaringannya dengan penyintas dan organisasi perempuan di negara-negara bekas pendudukan Jepang di Asia. Pada tanggal 6 Juli 1992, juru bicara pemerintah Jepang menyampaikan permintaan maaf yang mengakui keterlibatan resmi Angkatan Darat Jepang dalam perekrutan “wanita penghibur” dan administrasi pusatnya. Namun, pernyataan itu tidak mengakui perekrutan paksa atau menawarkan kompensasi apa pun kepada masing-masing korban. Pada konferensi pers keesokan harinya, Lee Hyo-jae mengecam sikap tidak tulus pemerintah Jepang dan tidak memadainya pernyataan apapun yang menyangkal pola paksaan perekrutan dan perbudakan seksual (Chai, 1993, hlm. 82).

Pada 21 Juli 1992, dalam halaman utama surat kabar Asahi Shimbun mengekspos kisah ‘wanita penghibur’ di Semarang, Indonesia. Surat kabar ini menjelaskan bahwa terdapat dokumen-dokumen dari pengadilan kejahatan perang Indonesia yang diselenggarakan di Sumatera membuktikan perekrutan paksa. Hal ini merupakan bukti pertama yang terdokumentasi dan mengungkapkan bahwa total 300 wanita Hindia-Belanda telah dipaksa menjadi budak seks militer Jepang di bawah ancaman kematian bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka Asahi, Shimbun, 1992; Chai, 1993, hlm. 82).

Penemuan dokumen ini menjadi salah satu latar belakang terbentuknya jaringan advokasi transnasional Asia. Hal ini diwujudkan melalui peristiwa pada 10-11 Agustus 1992, dibawah koordinasi Korean Council yang mengadakan Konferensi Solidaritas Perempuan Asia Pertama di Seoul berama dengan organisasi perempuan di Asia lainnya (War and Women’s Human Rights Museum, 2022). Di dalam konferensi tersebut dihadiri oleh organisasi dari Jepang, Filipina, Taiwan, China, Hong Kong, dan Indonesia. Sebagai organisasi advokasi paling aktif di Asia, Korean Council telah memperoleh manfaat dari partisipasi

organisasi lain karena dapat menambah peluang untuk didengar oleh pemerintah Jepang dan komunitas internasional. Begitupun dengan organisasi lainnya mendapatkan manfaat dalam melancarkan langkah pergerakan karena belajar dari peserta lain, terutama Korea dan Jepang (Min, 2021, hlm. 373).

Sebulan kemudian, yakni pada 14-25 Juni 1993, Korean Council mendatangi World Human Rights Conference di Wina, Austria dan disana Kim Bok-dong, penyintas *jeongshindae* lainnya memberikan kesaksian (War and Women's Human Rights Museum, 2022). Isu *jeongshindae* dimasukkan ke dalam salah satu jenis pelanggaran sebagai perbudakan seksual. Meski sempat mendapat sanggahan dari delegasi pemerintah Jepang, pada akhirnya *jeongshindae* tetap masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut (Women's Human Rights Institute of Korea, 2022). Setelah konferensi ini, menghasilkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada 20 Desember 1993 (United Nations Human Rights, 2022).

Sebelumnya, pada tahun 1992, Korean Council telah mengangkat masalah ini ke UN SCPPHR. Isu *jeongshindae* juga diangkat oleh organisasi perempuan di Jepang pada bulan Februari 1992, dan kembali diangkat pada bulan Mei 1992 di Kelompok Kerja Bentuk Perbudakan Kontemporer bersama dengan masalah penculikan pekerja secara paksa. Mengenai masalah penculikan pekerja atau buruh paksa diangkat pula dalam Konferensi Solidaritas Perempuan Asia ke-2 tentang Isu Perbudakan Seksual Militer oleh Jepang (1993), yang mana bermaksud untuk membedakannya dengan yang dieksploitasi sebagai budak seks untuk militer Jepang (Research Institute on Japanese Military Sexual Slavery, 2020).

Pada Agustus 1993, Shin Hei-soo dan aktivis lainnya mengorganisir diskusi panel tentang perbudakan seksual militer oleh Jepang. Upaya yang selama ini telah dilakukan dalam melobi Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendapatkan hasil yang sepadan ketika tercapainya sebuah pertemuan dengan Linda Chaves. Minat PBB

akan isu ini menekan pemerintah Jepang dan mengarah pada pengumuman Pernyataan Kono pada tahun 1993 (Women's Human Rights Institute of Korea, 2022).

Dinamika Perubahan Kebijakan dan Sikap Jepang terhadap Isu Jeongshindae

Pengajuan isu *jeongshindae* sebagai perbudakan seksual terus berlanjut hingga PBB memberikan dukungan yang berbentuk rekomendasi dalam laporan-laporannya. Hal ini dapat menambah tekanan bagi Jepang untuk segera mengambil pertanggungjawaban terhadap penyintas.

Tabel 1
Dinamika Perubahan Sikap dan Kebijakan Jepang serta Respon Aktor Pergerakan

Tahun	Sikap/Kebijakan Jepang	Respon Aktor Pergerakan
1993	Pengakuan keterlibatan dan Perekrutan Paksa dalam Pernyataan Kono	Menuntut pertanggungjawaban nyata.
1994 - 2007	Proyek Asian Women's Fund	<ul style="list-style-type: none"> - Konferensi "Menentang Inisiatif Pemerintah dalam Pengumpulan Dana Pribadi untuk Uang Belasungkawa" - Kampanye Sengo Hosho Jitsugen - Pembatalan AWF dalam Demonstrasi Rabu ke-218 - Demonstrasi "Tidak untuk Dana Nasional!" - Mencegah penyintas menerima uang dari AWF - Pengadilan Internasional Kejahatan Perang Terhadap Perempuan

2015	Perjanjian Jepang-Korea Selatan -	Menolak karena tidak melibatkan penyintas dan tidak memenuhi tuntutan jeongshindae.
------	---	---

Pada bulan September 1994, Shin Hei-soo membujuk Coomaraswamy untuk mengambil isu ‘wanita penghibur’ sebagai misi investigasi pertamanya (Women’s Human Rights Institute of Korea, 2022). Coomaraswamy mengunjungi Korea dan Jepang pada tahun 1995 untuk menyelidiki isu ini. Ia melakukan wawancara dan data historis yang disajikan dalam laporan 1996. Di dalamnya terdapat rekomendasi agar pemerintah Jepang mengambil tindakan hukum, mencakup identifikasi dan hukum sejauh mungkin para pelaku yang terlibat dalam perekrutan dan pelembagaan rumah bordil selama Perang Dunia II (Coomaraswamy, 2015; Min, 2021, hlm. 369).

Shin Hei-soo dan Totsuka Etsuo untuk mencari keadilan bagi penyintas melalui International Commission of Jurists (ICJ) atau Komisi Hakim Internasional. ICJ menerbitkan laporannya pada 22 November 1994 (Women’s Human Rights Institute of Korea, 2022). Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi agar pemerintah Jepang mengambil tindakan untuk memberikan kompensasi kepada penyintas dan menerima pengaduan dari Permanent Court of Arbitration (PCA) atau Pengadilan Arbitrase Permanen Internasional (War and Women’s Human Rights Museum, 2022). Namun, pada Juli 1995, pemerintah Jepang menolak gagasan arbitrase (Min, 2021, hlm. 371). Penolakan ini terjadi karena Jepang akan mendirikan Asian Women’s Fund (AWF).

Rencana pendirian sampai keberjalanan AWF menimbulkan respon yang negatif dari aktor pergerakan karena tidak memenuhi tuntutan dengan baik. Diantaranya, pada awal pendirian terdapat permasalahan sumber uang kompensasi AWF berasal dari dana pribadi dan diberikan sebagai mimaikin atau uang belasungkawa. Kemudian terdapat penyaluran dana sembunyi-sembunyi kepada

penyintas. Hal ini menyebabkan penderitaan kembali terhadap penyintas yang menerimanya karena kekecewaan organisasi pergerakan dan cibiran masyarakat.

Kegagalan AWF juga mendapat respon dari berbagai pihak. Dari aktor pergerakan transnasional, Violence against Women in War Network—Japan (VAWW NET-Japan) mengadakan Women’s International War Crimes Tribunal (WIWCT) atau Pengadilan Internasional Kejahatan Perang Terhadap Perempuan (2000). Pengadilan internasional informal seperti WIWCT akan memiliki kekuatan simbolis untuk menekan pemerintah Jepang. WIWCT diadakan karena kegagalan TWCT (1946-1948) atau Pengadilan Kejahatan Perang di Tokyo, karena menurut penilaian Matsui, hakim dan jaksa yang ada ialah laki-laki yang tidak memperhatikan keseriusan isu ini (Matsui, 1999, hlm. 112; Min, 2021, hlm. 395). WIWCT kemudian diadakan pada 8-12 Desember 2000 di Kudan Kaikan Hall di Tokyo. Orang-orang yang didakwa adalah mereka yang pernah diadili sebelumnya, namun bedanya pada pengadilan kali ini menambahkan Kaisar Hirohito sebagai terdakwa (Chinkin, 2001, hlm. 336-337).

Dari dunia internasional, Komisi Hak Asasi Manusia PBB masih mengeluarkan laporan-laporannya. Agenda penetapan isu ditambah yang tidak hanya sebagai perbudakan seksual. Dalam laporan pada 8 Agustus 1998 oleh Gay J. McDougall, seorang ahli hukum internasional Amerika, sebagai Pelapor Khusus untuk Bentuk Perbudakan Kontemporer yang ditunjuk Komisi HAM PBB. Hukum internasional yang dilanggar Kekaisaran Jepang dalam praktik jūgun’ianfu selama Perang Dunia II, diantaranya terdapat pelarangan terhadap perbudakan, pemerkosaan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (United Nations, 1998).

Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan organisasi PBB lainnya telah mengirimkan banyak laporan lain dengan rekomendasi kepada pemerintah Jepang pada tahun 2000-an dan 2010-an. Pada periode ini beberapa

laporan tentang isu 'wanita penghibur' kembali dikirim oleh pelapor khusus PBB ke pemerintah Jepang. diantaranya pada tahun 2006, Doudou Diene, mengunjungi Jepang dan menekankan pentingnya "mengakui tanggung jawab Jepang untuk menetapkan sistem *jūgun'ianfu* dalam buku-buku sekolah". Kemudian pada tahun 2010, Rashida Manjoo, menyinggung kasus 'wanita penghibur' sebagai contoh 'pengabaian penyelesaian terhadap masalah perempuan' (Min, 2021, hlm. 370-371).

Kebijakan Jepang pada masa pemerintahan pertama Shinzo Abe (2006-2007) menolak isu *jeongshindae* sebagai perbudakan seksual dan kejahatan perang Jepang. Hal ini ia sampaikan pada 1 Maret 2007 kepada Diet Nasional bahwa tidak ada bukti 'wanita penghibur' telah direkrut secara paksa dan kemudian pernyataan itu diadopsi sebagai keputusan Kabinet (Nishino dan Shouji, 2010). Kebijakan PM Abe terhadap isu *jeongshindae* ini menjadi pendorong bagi dua kelompok yang bersaing untuk melancarkan agendanya, yakni revisionis dan aktor pergerakan.

Pada prosesnya, WCCW (Washington Coalition for Comfort Women Issues) melobi anggota DPR AS, yakni melalui Lane Evans dan Michael Honda. Soh Ok-cha sebagai perwakilan dari WCCW bersama dengan suaminya, yaitu Lane Evans terus menindaklanjuti hal ini agar resolusi dapat tembus dan disahkan oleh Komite Urusan Luar Negeri DPR AS (Min, 2021, hlm. 436). Dalam perjalanannya, Evans meminta bantuan anggota kongres demokratik, Michael Honda. Resolusi yang berhasil tembus adalah H.Res. 121 dan berhasil disahkan oleh DPR AS pada 30 Juli 2007.

Resolusi yang dikeluarkan Honda mendapat reaksi negatif. Konservatif tidak menerima sistem *jūgun'ianfu* sebagai bentuk apa pun selain prostitusi berlisensi. Jepang menempatkan komentar publik yang ditampilkan iklan di Washington Post pada 14 Juni 2007 dalam tajuk "The Facts". Lima fakta yang disajikan dalam komentar publik mencerminkan perspektif nasionalis konservatif Jepang (Soh, 2003, hlm. 138). Di dalam iklan "The Facts"

telah ditandatangani oleh 44 anggota DPR Jepang. Ketika mendapat kritikan dan ditanya, pemerintah Jepang menunjukkan posisi yang samar-samar sebagaimana diungkapkan Kabinet Abe pada 16 Maret 2007, bahwa dokumentasi mengenai "wanita penghibur" yang ditemukan pada tahun 1993. Pemerintah Jepang bermaksud untuk menjaga pengakuan paksaan dan sistem *jūgun'ianfu* dalam status hukum dan politik yang ambigu (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2009, hlm. 4).

Abe sebagai Perdana Menteri yang kedua kalinya dan telah diresmikan pada 26 Desember 2012 kembali membuat pernyataan mengenai isu *jeongshindae* pada April 2013. Kali ini ia mendiskreditkan pernyataan Murayama pada 1995 terkait perang agresi yang dilakukan Jepang selama Perang Pasifik. Pernyataan Abe ini disahkan di Diet Nasional sebagai Pernyataan Penolakan Perang (Fusen Ketsugi). Abe berulang kali mengatakan dalam Diet Nasional bahwa tidak ada definisi akademis atau hukum yang jelas tentang "perang agresi" (Lewis, 2017, hlm. 170-171).

Pemerintah AS mengkritik komentar negatif Abe atas Pernyataan Kono dan Murayama. Suasana politik yang berubah-ubah mengenai isu 'wanita penghibur' mengubah sikap publik Abe lagi, mengklaim bahwa ia tulus merasa kasihan pada penyintas (Lewis, 2017, hlm. 171). Sikap tersebut ditunjukkan dalam pernyataan Abe di Komite Anggaran DPR Jepang pada 15 Maret 2013. Ia mengumumkan mengenai posisi pemerintah sebelumnya yang mengakui akan dilanjutkan oleh Kabinet Abe (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2013).

Sikap Abe kembali pada posisi awalnya yang menolak, ketika pada Juli 2013 LDP memenangkan dan mendominasi Diet Nasional. Abe memiliki wewenang dan kekuatan penuh untuk mengeluarkan kebijakan apapun. dalam masalah kolonialisme Jepang, Abe menunjukan sikap yang menimbulkan ketegangan dengan China dan Korea Selatan karena dianggap mencirikan anti-perang. Hal ini ia lakukan ketika mengunjungi Kuil

Yasukuni pada 26 Desember 2013, tempat dimana para 'pahlawan perang' dalam sebutan Jepang atau 'penjahat perang' menurut istilah postkolonial dimakamkan (BBC News, 2013). Setelah mendapat kekuatan, agenda semula Abe untuk mendiskreditkan pernyataan-pernyataan PM sebelumnya diwujudkan dalam pada 28 Februari 2014, oleh Ketua Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga yang mengumumkan pembentukan tim untuk meninjau proses penulisan pernyataan Kono (Haruki & Jung, 2015, hlm. 280). Kesaksian penyintas tidak disertai dengan dokumen pendukung dan ketika pernyataan Kono keluar dilakukan atas dasar tekanan dari pemerintah Korea kepada Jepang (Lewis, 2017, hlm. 173). Menganalisis hal tersebut, tim peninjau pernyataan Kono ini seakan melupakan dokumen resmi yang ditemukan oleh Yoshimi Yoshiaki.

Ditengah perhelatan yang terjadi beberapa kali pertemuan antara kedua pemerintah diadakan dalam jangka waktu berbulan-bulan untuk membahas penyelesaian isu 'wanita penghibur' hingga akhirnya mencapai keputusan untuk mengeluarkan Perjanjian Jepang-Korea Selatan pada 28 Desember 2015. Di balik perlunya mencapai perjanjian ini merupakan hasil dari perhitungan kepentingan nasional di Jepang dan Korea Selatan berdasarkan keuntungan yang didapatkan.

Kumagai (2016, hlm. 69) menjelaskan bahwa dalam hal keamanan, Jepang dan AS mengharapkan pengembangan hubungan kerja sama antara Jepang dan Korea Selatan. Urgensi perlunya kerjasama trilateral antara Korea Selatan-Jepang-AS adalah untuk melawan nuklir Korea Utara. Kemudian diperlukan untuk menanggapi perubahan keseimbangan kekuasaan Asia Timur Laut yang disebabkan oleh kebangkitan Cina.

Pengaruh AS terhadap Jepang tampak pada sikap Abe yang pada akibatnya dapat dikatakan bahwa ia tidak terlalu menjadi nasionalis militan dalam menghadapi isu 'wanita penghibur'. Kumagai (2016, hlm. 72) lebih lanjut mengemukakan bahwa hal ini muncul ketika pemerintah AS mengatakan

kekecewaannya atas kunjungan Abe ke Kuil Yasukuni. Setelah mendapat respon tersebut, Abe menahan diri dari kunjungan lebih lanjut. Selain itu, pemerintah AS dan kebanyakan cendekiawan di AS keberatan dalam gagasan Jepang meninjau pernyataan Kono. Akhirnya Abe menyetujui keberatan ini dengan tidak meninjau pernyataan itu sendiri tetapi, sebaliknya, hanya menyelidiki proses yang ditulisnya. Berdasarkan perkembangan ini, AS mempengaruhi perubahan dalam pemahaman historis Perdana Menteri Abe.

Terlepas dari urgensi antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang yang telah dijelaskan sebelumnya dalam memutuskan perjanjian kesepakatan pada 28 Desember 2015, bagaimanapun objek dalam penyelesaian isu *jeongshindae* adalah penyintas itu sendiri. Pada kenyataannya, meskipun merupakan langkah positif antara kedua negara pada tingkat politik, perjanjian kesepakatan tersebut gagal menutup luka emosional penyintas. Penyintas dan aktivis pergerakan tidak menerima adanya perjanjian ini sebagai penyelesaian isu *jeongshindae*.

DISKUSI

Ketika Jepang terus melakukan penolakan tanggungjawab, maka yang terjadi adalah pola bumerang dan tekanan terus menegang di antara berbagai pihak. Siklus ini tidak dapat dihentikan kecuali jika Jepang mengakui dan memenuhi tuntutan *jeongshindae*. Pergerakan yang berlangsung lama mencirikan bahwa isu ini terus diperjuangkan hingga sekarang. Misalnya Demonstrasi Rabu yang dilaksanakan setiap hari Rabu setiap minggu di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul, berhasil mencetak rekor untuk protes perdamaian terlama di dunia sebanyak 1.525 kali ampai pada 6 Januari 2022 (Lee, 2022).

Ketercapaian gerakan *jeongshindae* berarti telah mencapai seluruh tujuan dalam efektifitas jaringan transnasional. Namun dalam impelementasinya atau perilaku negara, kesepakatan yang dibuat itu sendiri yakni dalam Perjanjian Korsel-Jepang 2015 tidak melibatkan aktor pergerakan. Proses rekonsiliasi yang ditempuh memang telah dilaksanakan sesuai

prosedur, sebagaimana menurut Lestari (2019, hlm. 128) bahwa kedua negara telah melakukan upaya untuk membentuk masa lalu melalui upaya investigasi dan pengakuan dari kedua belah pihak, upaya permintaan maaf, upaya ganti rugi, serta upaya yang berorientasi pada hubungan di masa depan dengan kerjasama dan negosiasi. Namun dalam upaya-upaya tersebut tidak diikuti dengan proses kerjasama yang inklusif antara seluruh pihak utamanya NGO dan penyintas.

SIMPULAN

Proses gerakan *jeongshindae* dimulai dengan penetapan agenda yaitu isu 'wanita penghibur' di Korea atau *jeongshindae* sebagai perbudakan seksual. Didalamnya tuntutan pemenuhan hak-hak penyintas mulai disampaikan, yang pada awalnya melalui jalur domestik atau pemerintah yakni langsung meminta dukungan Presiden Korea Selatan agar menyampaikan tuntutan dalam pertemuan dengan Kaisar dan Perdana Menteri Jepang. Sikap Jepang secara umum tidak menerima tuntutan penyintas secara penuh. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat berbagai permasalahan dalam upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk bertanggungjawab, seperti dalam proyek Asian Women's Fund. Dalam perjalanan prosesnya, pergerakan Korean Council mengalami perkembangan dengan menuju ke tahap internasional, dengan memperkuat jaringan advokasi transnasional bersama dengan organisasi-organisasi di Amerika Serikat, Jepang, dan negara bekas pendudukan Jepang lainnya. Selain itu mencari dukungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan organisasi antar-pemerintah lainnya untuk menambah tekanan bagi Jepang agar dapat memberikan pertanggungjawaban yang nyata dan sesuai dengan tuntutan penyintas.

Pada akhirnya, tuntutan *jeongshindae* tidak terpenuhi karena kegagalan Perjanjian Korea Selatan-Jepang 2015 yang tidak melibatkan aktor pergerakan dalam penyelesaiannya. Perjanjian ini sendiri berlandaskan adanya

urgensi untuk kembali memperbaiki hubungan diplomasi agar dapat memenuhi kepentingan nasional, dengan kendali dari pemerintah Amerika Serikat. Berbagai bentuk penolakan pun dipatahkan karena perjanjian ini merupakan keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, pemerintah Jepang belum mengakui secara tulus dan benar mengenai sistem perbudakan seksual jūgun'ianfu dan penyintas tidak mendapatkan hak yang pantas sebagai korban.

Penyelesaian isu *jeongshindae* dapat menjadi implikasi bagi pemerintah Korea Selatan dan Jepang agar kedepannya lebih melibatkan dan mengutamakan penyintas. Selain itu, mengesampingkan kepentingan lain agar tidak kembali merugikan penyintas. Pergerakan juga terjadi di negara pendudukan Jepang lainnya, khususnya Indonesia. Strategi gerakan *jeongshindae*, diharapkan dapat menjadi dorongan kuat bagi organisasi-organisasi dan penyintas di Indonesia. Berkaca pada kasus jūgun'ianfu pendidikan seksual dan gender berbasis moral dan agama penting untuk disebarluaskan sehingga dapat menjadi upaya preventif kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan maupun bahan pengembangan terkait gerakan *jeongshindae*. Jika terdapat peneliti yang berminat mengkaji topik serupa, bentuk pergerakan dapat diperluas ke aspek budaya kontemporer seperti hallyu atau korean wave yang muncul pada film, drama korea, dan seni hiburan lainnya yang gerakan *jeongshindae* untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam pendidikan sejarah, gerakan *jeongshindae* dapat menjadi muatan materi dalam pembelajaran sejarah di sekolah untuk Kompetensi Dasar 3.6 yaitu "Menganalisis pengaruh PD I dan PD II terhadap kehidupan politik, sosial-ekonomi dan hubungan internasional (LBB, PBB), pergerakan nasional dan regional" Gerakan *jeongshindae* dapat menjadi contoh pergerakan nasional yang dilakukan oleh kaum perempuan akibat dari

perbudakan seksual terhadap perempuan untuk menunjang kebutuhan tentara Jepang dalam Perang Dunia II. Dalam penyelesaiannya akan berkaitan dengan hubungan internasional dan peran lembaga hak asasi manusia internasional sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ikut serta menangani permasalahan ini. ditandai

REFERENSI

- Asahi Shimbun Digital. (2015, September 14). *Citizens groups opposed Asian Women's Fund*. 朝日新聞デジタル. <https://www.asahi.com/articles/ASG8L6FQ7G8LULPT00Y.html>
- BBC News. (2013, December 26). *Japan PM Shinzo Abe visits Yasukuni WW2 shrine*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-25517205>
- Chai, A. Y. (1993). Asian-Pacific feminist coalition politics: The Chōngshindae/Jūgunianfu ("comfort women") movement. *Korean Studies*, 17(1), 67–91. <https://doi.org/10.1353/ks.1993.0001>
- Chinkin, C. M. (2001). Women's international tribunal on Japanese military sexual slavery. *American Journal of International Law*, 95(2), 335–341. <https://doi.org/10.2307/2661399>
- Choi, E. (2002). *Not 'comfort women' but 'sexual slavery'* ['위안부' 가 아니라 '성노예']. OhmyNews.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2009). *An NGO shadow report to CEDAW: Violence against women (Japan's military sexual slavery/the "comfort women" issue)*. https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/comfortwomen_japan_cedaw44.pdf
- Della Porta, D., & Tarrow, S. (2005). *Transnational protest and global activism*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Garraghan, G. J. (1957). *A guide to historical method*. Fordham University Press.
- Hartono, A. B., & Juliantoro, D. (1997). *Derita paksa perempuan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Haruki, W., & Jung, J. (2015). *To resolve the issue of Japanese military 'comfort women'* [일본군 '위안부' 문제의 해결을 위하여]. Yeoksagonggan.
- Hwang, S. (2020). Transnational memory activism and the comfort women redress movement in South Korea. *Memory Studies*, 13(6), 1021–1037. <https://doi.org/10.1177/1750698019877571>
- Jeong, H. (2019). The politics of apology: Japan and South Korea's comfort women agreement. *Asian Journal of Peacebuilding*, 7(1), 91–113. <https://doi.org/10.18588/202005.00a084>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Kim, S. (2014). *23 years of the comfort women movement* [일본군 '위안부' 23년 운동의 역사]. Women News. <https://www.womennews.co.kr/news/articleView.html?idxno=74239>
- Korean Church Women United. (1984). *Our stance on President Chun Doo-hwan's visit to Japan* [전두환 대통령 일본 방문에 즈음 한 우리의 입장].
- Kristi, R. (2016). Perbedaan respon Indonesia dan Korea Selatan dalam penyelesaian Jugun Ianfu terhadap Jepang. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 323–334.
- Kumagai, N. (2016). The background to the Japan–Republic of Korea agreement: Compromises concerning the understanding of the comfort women issue. *Asia-Pacific Review*, 23(1), 65–99. <https://doi.org/10.1080/13439006.2016.1195955>
- League of Nations. (1926). *Convention to suppress the slave trade and slavery*. UNHCR. <https://www.refworld.org/docid/3ae6b36fb.html>
- Lee, J. (2022). [Reportage] *30 years of "comfort women" rallies mark world's longest peace protest*. Hankyoreh English. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1026300.html

- Lee, S. (1992, May 15). *UN fact-finding on comfort women/Japanese daily newspaper report/Adopted by the Human Rights Commission* [유엔, 정신대 진상조사]. JoongAng Ilbo. <https://www.joongang.co.kr/article/2709312#home>
- Lestari, L. E. (2019). Upaya rekonsiliasi Jepang dan Korea Selatan terkait isu comfort women (Jugun Ianfu) dari tahun 1990 hingga tahun 2015 [Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya].
- Lewis, M. (Ed.). (2017). 'History wars' and reconciliation in *Japan and Korea: The roles of historians, artists and activists*. Palgrave Macmillan.
- Min, P. G. (2021). *Korean "comfort women": Military brothels, brutality, and the redress movement*. Rutgers University Press.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2013). *The points of remarks by Prime Minister Shinzo Abe* (Upper House Budget Committee). https://www.mofa.go.jp/policy/page3e_000119.html
- Mingzhe, X. (2017). Comfort women: Historical agony and practical tasks. *Unification Humanities*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.17783/IHU.2017.3.1.15>
- Nishino, R., & Shouji, R. (2010). *The falsified truth: NHK program tampering incident [そばかれた真実: NHK番組改ざん事件]*. Gendai Shokan.
- Park, H. J. (2018). Memory activism and the comfort women issue: South Korea's global civil society network. *Asian Perspective*, 42(3), 377–400. <https://doi.org/10.1353/apr.2018.0018>
- Research Institute on Japanese Military Sexual Slavery. (2020). *Japanese military "comfort women"*. <https://kyeol.kr/en/comfort-women>
- Rodriguez, J. P. (1997). *The historical encyclopedia of world slavery* (Vol. 1). ABC-Clio.
- Sakaki, A. (2019). *Japan–South Korea relations: A downward spiral—More than "just" historical issues*. SWP Comment, 35, 1–7. <https://doi.org/10.18449/2019C35>
- Seongsinyeodae Shinhakhyeobryeokdan. (2006). *Official visit of President Chun Doo-hwan to Japan* [전두환 대통령 일본 공식 방문]. <https://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=002863&pageFlag=&sitePage=>
- Soh, C. S. (1996). The Korean "comfort women": Movement for redress. *Asian Survey*, 36(12), 1226–1240. <http://www.jstor.org/stable/264557>
- Soh, C. S. (2003). Japan's National/Asian Women's Fund for "comfort women". *Pacific Affairs*, 76(2), 209–233. <https://doi.org/10.2307/40024391>
- Song, J. (2019). From silence to solidarity: South Korea's comfort women activism and transnational justice. *International Feminist Journal of Politics*, 21(5), 753–772. <https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1562337>
- United Nations. (1998). *Contemporary forms of slavery: Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict* (Final report by Ms. Gay J. McDougall, Special Rapporteur).
- United Nations Human Rights. (2022). *World Conference on Human Rights, Vienna, 1993*. <https://www.ohchr.org/en/about-us/history/vienna-declaration>
- War and Women's Human Rights Museum. (2022). *Part 1 | Political and social background* [1부 | 정치·사회적인 배경]. <https://womenandwarmuseum.net/exhibition/ex-04/section-01/>
- Women's Human Rights Institute of Korea. (2022). *"Comfort women" issue's journey to UN*. <https://kyeol.kr/sites/default/files/resources/M-11.pdf>
- Yoon, J. (2017). The Korean comfort women commemorative campaign: Role of intersectionality, symbolic space, and transnational circulation in politics of memory and human rights [Doctoral dissertation, University of Tennessee].
- Yoshimi, Y. (2000). *Comfort women: Sexual slavery in the Japanese military during World War II*. Columbia University Press.